

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat belakangan ini telah menjadi fenomena global, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kebutuhan hunian, tetapi juga mendorong pembangunan fisik wilayah yang masif untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik manfaat pembangunan tersebut, terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, terutama terkait dengan berkurangnya lahan hijau akibat konversi lahan. Lahan yang semula berfungsi sebagai ruang tumbuh vegetasi dan kawasan resapan air, kini banyak dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman, industri, dan sarana pendukung kegiatan perkotaan (Widiyaningsih & Suharini, 2021). Fenomena ini semakin diperparah oleh rencana tata ruang wilayah yang tidak memadai, sehingga mempercepat proses konservasi lahan dan mengancam keberlanjutan lingkungan (Apriyana, 2015).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu komponen krusial dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota yang menjaga kualitas udara, tetapi juga sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan sosialisasi masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, RTH didefinisikan sebagai area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik secara alami maupun yang sengaja ditanam. Tujuan penyelenggaraan RTH antara lain untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, dan sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi RTH pada wilayah perkotaan harus mencapai minimal 30% dari total luas wilayah, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH publik, seperti taman kota, jalur hijau, dan pemakaman umum, memiliki peran penting dalam menjaga ekologi kota karena dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas.

Namun, realitas di banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Bukittinggi, menunjukkan bahwa ketersediaan RTH masih jauh dari standar yang ditetapkan. Kota Bukittinggi, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah dengan luas wilayah 25,24 km². Kota ini terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Guguak Panjang, Mandiangin Koto Selayan, dan Aur Birugo Tigo Baleh. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kepadatan penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2023 mencapai 4.817 orang/km², dengan jumlah penduduk sebanyak 121.588 jiwa (Alfindo, 2024). Pertumbuhan penduduk yang dinamis ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman dan infrastruktur, sehingga mengancam ketersediaan RTH.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN), luas RTH di Kota Bukittinggi pada tahun 2022 hanya mencapai 5,12% dari total luas wilayah, dan mengalami penurunan menjadi 4,41% pada tahun 2023. Angka ini jauh di bawah proporsi minimal 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan RTH ini tentu berdampak negatif terhadap kualitas tata ruang dan ekologi kota. Selain itu, kurangnya data spasial yang akurat mengenai kondisi RTH di Kota Bukittinggi turut menghambat upaya pengelolaan dan pengembangan RTH yang optimal. Pemerintah daerah setempat belum memiliki sistem informasi yang terbuka dan terintegrasi mengenai RTH, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH juga menjadi terbatas.

Penelitian terdahulu mengenai RTH di berbagai kota di Indonesia telah mengungkap berbagai masalah serupa. Misalnya, penelitian Supriyatna (2017) di Kota Bandung menemukan bahwa kondisi RTH masih belum memadai, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH masih rendah. Sementara itu, penelitian Wahyuni (2019) di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan luas RTH, pengelolaan dan pemeliharaannya masih perlu ditingkatkan. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa masalah RTH tidak hanya terbatas pada aspek kuantitas, tetapi juga pada efektivitas pemanfaatan dan pengelolaannya.

Efektivitas pemanfaatan RTH tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna dan pengelola. Tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap RTH menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pengelolaan RTH. Penelitian Supriatna (2017) di Kota Bandung mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang RTH masih rendah, yaitu sekitar 40%. Sementara itu, penelitian Wahyuni (2019) di Kota Yogyakarta menemukan bahwa sikap masyarakat terhadap RTH belum sepenuhnya positif, dan penelitian Sutanto (2020) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam memanfaatkan RTH masih belum optimal.

Kondisi ini tentu tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat. Ruang Terbuka Hijau memiliki peran penting dalam menjaga kualitas udara, mengurangi polusi, dan menciptakan iklim mikro yang sejuk. Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai sarana rekreasi dan edukasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial masyarakat. Namun, ketika ketersediaan RTH tidak memadai, masyarakat berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan akibat polusi udara dan stres akibat kurangnya ruang terbuka untuk berinteraksi dengan alam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai kondisi RTH di berbagai kota di Indonesia. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Supriyatna (2017) di Kota Bandung menemukan bahwa meskipun RTH memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan, kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penghijauan dan pemeliharaan RTH. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wahyuni (2019) di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan luas RTH, pengelolaan dan pemeliharaannya masih belum optimal. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengelolaan RTH. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa partisipasi

masyarakat dalam pemeliharaan RTH masih rendah, sehingga banyak RTH yang tidak terawat dengan baik.

Sementara itu, penelitian Sutanto (2020) di Kota Surabaya menemukan bahwa perilaku masyarakat dalam memanfaatkan RTH masih belum optimal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami fungsi ekologis RTH, sehingga cenderung memanfaatkan RTH hanya sebagai tempat rekreasi tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya fasilitas pendukung di RTH, seperti tempat sampah dan area bermain anak, menjadi faktor penghambat pemanfaatan RTH secara optimal.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Kota Bukittinggi terhadap RTH. Penelitian ini penting dilakukan karena pengembangan RTH tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan RTH yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH bagi kualitas hidup dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang tata ruang dan lingkungan, khususnya terkait dengan pengelolaan RTH di kota-kota dengan karakteristik geografis dan demografis yang mirip dengan Kota Bukittinggi. Dengan memahami tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat, pemerintah dapat merancang program-program edukasi dan sosialisasi yang lebih tepat sasaran, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH dapat meningkat. Oleh sebab itu, peneliti berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bukittinggi”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, beberapa masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Luas RTH di Kota Bukittinggi tidak memadai. Luas RTH hanya mencapai 4,41% pada tahun 2023, jauh di bawah standar minimal 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
2. Meningkatnya jumlah penduduk, berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pembangunan, sehingga terjadinya alih fungsi lahan yang semula lahan hijau, menjadi lahan terbangun.
3. Ruang terbuka hijau dianggap sebagai lahan cadangan yang tidak ekonomis.
4. Pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat Kota Bukittinggi terhadap Ruang Terbuka Hijau, perlu diketahui agar dapat digunakan sebagai acuan sekaligus juga evaluasi untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau ke depannya.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap ruang terbuka hijau Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana hubungan tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bukittinggi?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Menganalisis kondisi ruang terbuka hijau di Kota Bukittinggi.
2. Menganalisis tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang terhadap Ruang Terbuka Hijau.
3. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap kondisi ruang terbuka hijau di Kota Bukittinggi.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ilmiah dan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Prodi Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki acuan dalam mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap ruang terbuka hijau. Dapat dimanfaatkan pemerintah dalam acuan sebagai evaluasi ruang terbuka hijau

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat memiliki pengetahuan umum mengenai ruang terbuka hijau dan mengetahui bagaimana dalam berperilaku dalam penyediaan ruang terbuka hijau.

1.6. Definisi Operasional

Penelitian berjudul “Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Ruang terbuka Hijau di Kota Bukittinggi” ini semestinya ditentukan batasan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian yang dilakukan. Definisi operasional dibutuhkan untuk tujuan agar menyelaraskan persepsi terhadap isi pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

1.6.1. Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan merupakan kemampuan memiliki informasi yang dimiliki oleh seseorang sebagai hasil dari proses kepekaan panca indera. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang ruang terbuka hijau di kota Bukittinggi didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ruang terbuka hijau dengan benar. Indikator tingkat pengetahuan yaitu pengetahuan masyarakat terhadap pengertian ruang terbuka hijau, kemampuan dalam mengetahui jenis ruang terbuka hijau, kemampuan dalam mengevaluasi ruang terbuka hijau, dan kemampuan dalam menyebutkan manfaat ruang terbuka hijau.

Zahria Martha Prima Yolanda, 2024

TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP KONDISI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BUKITTINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.6.2. Sikap Masyarakat

Sikap masyarakat merupakan kecenderungan bertindak masyarakat terhadap suatu hal, yang dalam hal ini yaitu ruang terbuka hijau serta penanganan respon dan upaya yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau tersebut. Sikap ini mencakup minat, kepedulian, partisipasi dan dukungan terhadap ruang terbuka hijau. Skala pengukuran menggunakan 5 skala (sangat positif, positif, netral, negatif, sangat negatif).

1.6.3. Perilaku Masyarakat

Perilaku masyarakat terhadap ruang terbuka hijau didefinisikan sebagai tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola, melestarikan dan menggunakan ruang terbuka hijau. Indikator perilaku masyarakat adalah kunjungan ke ruang terbuka hijau, aktifitas di ruang terbuka hijau, peran serta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, dan penggunaan ruang terbuka hijau. Skala pengukuran perilaku masyarakat menggunakan 5 skala (sangat aktif, aktif, sedang, tidak aktif, sangat tidak aktif).

1.6.4. Kondisi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau yaitu area atau jalur memanjang yang mana peruntukannya untuk tumbuh tumbuhan hijau baik secara alami maupun disengaja. Kondisi ruang terbuka hijau dilihat dari beberapa indikator yaitu jenis dan indikator fisik, ekologi dan sosial. Skala pengukuran kondisi ruang terbuka hijau menggunakan 5 skala (sangat baik, baik, sedang, kurang dan sangat kurang).